

Pedoman Umum

PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI

31.115-058
BAD
p

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
2002**

631.115-058

BAD

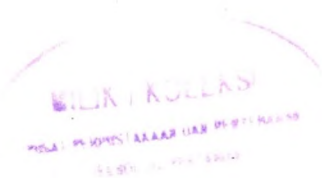
p



BK012913

Pedoman Umum

PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI



BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN

DEPARTEMEN PERTANIAN

2002

Vgl. terima	02 SEP 2003
No. Induk	977/D/2003
Asal dan cara	Pusat / Tukat / Hadiah
Daftar	

GPIS / 2003	2.9.03
ABSTRAK	
IFIS	

KATA PENGANTAR

Salah satu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis di era otonomi daerah adalah melalui perumusan kebijaksanaan nasional dan pedoman kerja bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Kebijaksanaan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian merupakan acuan makro, sedangkan pedoman kerja sangat diperlukan, karena penyuluhan pertanian dapat terselenggara dengan produktif, efektif dan efisien apabila didukung oleh para penyelenggara yang menguasai materi, metoda, teknik, organisasi, instrumen-instrumen dan manajemen penyuluhan pertanian.

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian melalui Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok antara lain merumuskan kebijaksanaan nasional dan konsepsi pembangunan penyuluhan pertanian. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian telah menyusun dan menerbitkan beberapa Pedoman Umum yang juga merupakan salah satu pedoman kerja bagi para penyelenggara penyuluh pertanian.

Pedoman ini adalah salah satu dari beberapa Pedoman Umum yang telah kami terbitkan. Harapan kami Pedoman-Pedoman Umum ini dapat dimanfaatkan oleh para penyelenggara penyuluh pertanian

dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Sebaliknya kami juga mengharapkan adanya masukan untuk dapat menyempurnakan Pedoman-Pedoman Umum ini.

Terima Kasih.

Jakarta, September 2002
Kepala Badan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Pertanian,



Dr. Sinis Munandar, MS

NIP. 080 019 269

DAFTAR ISI

	halaman
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Tujuan	3
C. Pengertian	3
BAB II. KERAGAAAN ORGANISASI PETANI	6
BAB III. CIRI-CIRI ORGANISASI PETANI	8
A. Organisasi Petani Non Formal	8
B. Organisasi Petani Formal	8
C. Organisasi Petani Yang Tangguh	9
BAB IV. PRINSIP, LINGKUP DAN STRATEGI PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI	12
A. Prinsip Pengembangan Organisasi Petani	12
B. Ruang Lingkup Pengembangan Organisasi Petani	13
C. Strategi Pengembangan Organisasi Petani	14
BAB V. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI	17
A. Penumbuhan Organisasi Petani	17
B. Peningkatan kemampuan anggota	23
C. Penguatan Organisasi Petani	24
D. Peranan Pemerintah	26
E. Peranan Masyarakat	29
F. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.	30
BAB VI. PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan sistem dan usaha agribisnis masa depan dihadapkan dengan berbagai perubahan lingkungan strategis, antara lain globalisasi, otonomi daerah, kebijakan pembangunan pertanian dan kemajuan petani itu sendiri. Globalisasi akan berimplikasi terhadap pergeseran nilai, perkembangan iptek, arus informasi, peluang ekonomi dan persaingan pasar.

Pada era otonomi daerah yang mengedepankan semangat keragaman, prakarsa dan kreativitas masyarakat menuntut adanya keterbukaan terhadap segala kemungkinan perubahan dalam melaksanakan pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Pada era otonomi daerah ini, peran pemerintah dalam pembangunan akan semakin kecil dan hanya bertindak sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Perubahan ini, memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan peran dan tata hubungan kerja masing-masing kelembagaan, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah, termasuk organisasi petani.

Paradigma baru pembangunan pertanian difokuskan pada pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Untuk itu pemberdayaan pelaku agribisnis, terutama petani, menjadi yang sangat strategis. Salah satu upaya pemberdayaan petani sebagai

pelaku usaha agribisnis dilakukan melalui menumbuh-kembangkan kelembagaan dan organisasi petani. Melalui kelembagaan/organisasi petani ini, para petani dapat melakukan kerjasama, mengembangkan usaha, menyalurkan dan mendapatkan hak-haknya.

Selain itu, melalui organisasi petani, prakarsa dan kepedulian petani akan lebih meningkat untuk membantu sesamanya melalui kegiatan tukar menukar pengalaman dan informasi yang mereka butuhkan. Demikian pula halnya tuntutan petani atas hak dan kewajibannya yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan kemajuan pembangunan, dapat terpenuhi.

Selama ini kebijaksanaan pemerintah dalam pembinaan dan pemberdayaan organisasi petani dilakukan melalui pendekatan kelompok sebagai organisasi non-formal. Kelompok tani merupakan wahana kerjasama agar petani yang mempunyai skala usaha kecil dapat bekerjasama untuk meningkatkan usahanya menjadi lebih besar dan menjadi lebih efisien. Dalam perkembangannya, banyak organisasi petani yang telah berbentuk organisasi formal berbadan hukum.

Pedoman Pengembangan Organisasi Petani ini disusun untuk menjadi salah satu acuan bagi petani dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberdayakan petani, dalam mengelola dan mengembangkan organisasinya menjadi organisasi yang tangguh. Organisasi Petani yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah organisasi yang dibentuk **dari, oleh** dan **untuk** para petani.

B. TUJUAN

Pedoman Pengembangan Organisasi Petani ini dibuat dengan tujuan :

1. Menyamakan persepsi tentang konsep kelembagaan/ organisasi petani.
2. Memahami ciri-ciri kelembagaan/organisasi petani yang tangguh.
3. Menyamakan prinsip dan arah pengembangan kelembagaan/organisasi petani.

C. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Pengembangan Organisasi Petani ini yang dimaksud dengan :

1. **Petani** adalah pengelola usahatani yang bergerak di bidang usahatani tanaman, ternak dan ikan.
2. **Kelompoktani** adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
3. **Kontaktani** adalah ketua atau mantan ketua kelompoktani yang masih aktif sebagai anggota kelompok dan diakui kepemimpinannya dalam menggerakkan anggota/petani mengembangkan usahanya.

4. **Gabungan Kelompok tani** adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
5. **Kontak tani-Nelayan Andalan (KTNA)** adalah kontak tani-nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik menurut kesepakatan, dari dan oleh para kontak tani-nelayan dalam satu wilayah administrasi pemerintahan untuk mewakili aspirasi petani/nelayan dalam forum dan atau kelembagaan di tingkat wilayah yang lebih tinggi.
6. **Kelompok KTNA** adalah kelompok yang anggotanya terdiri dari KTNA. Kelompok KTNA ada pada tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, sebagai wadah musyawarah para kontak tani dan mitra kerja sejajar pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan petani dan permasalahan pembangunan pertanian di setiap tingkat wilayah yang bersangkutan.
7. **Organisasi** adalah kumpulan dua orang atau lebih yang dengan sengaja menyatukan diri dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.
8. **Organisasi Non Formal** adalah organisasi yang belum mempunyai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan ketentuan hukum.
9. **Organisasi Formal** adalah organisasi yang sudah mempunyai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan telah berbadan hukum.

- 10. Organisasi Petani** adalah organisasi yang anggotanya petani dan dibentuk oleh petani, baik formal maupun non formal.
- 11. Gabungan Organisasi Petani** adalah wadah kerjasama antar organisasi petani atau kumpulan dari beberapa organisasi petani yang memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama.
- 12. Asosiasi Petani** adalah salah satu bentuk organisasi petani yang mempunyai usahatani suatu komoditas tertentu yang diusahakan secara komersial.

BAB II

KERAGAAN ORGANISASI PETANI

Organisasi Petani di Indonesia dewasa ini digolongkan atas tipologinya sebagai berikut:

- 1. Organisasi Petani Tradisional;** yaitu organisasi petani yang tumbuh sebagai kelanjutan dari adat kebiasaan budaya dan tradisi masyarakat atas dasar kebersamaan. Perkembangan organisasi ini banyak dipengaruhi oleh campur tangan pihak-pihak lain. Misalnya Subak di Bali, Puti Nagari di Sumatera Barat, Kelompok Mitembeyan di Jawa Barat.
- 2. Organisasi Petani Yang Ditumbuhkembangkan oleh Pemerintah;** misalnya Kelompokkani, Kelompok Wanitatani-nelayan, Kelompok Kontaktani-nelayan andalan (Kelompok KTNA), Kelompok Pemudatani-nelayan oleh Departemen Pertanian, Koperasi Unit Desa (KUD) oleh Departemen Koperasi.
- 3. Organisasi Petani Yang Ditumbuhkembangkan oleh Kegiatan Proyek;** misalnya Kelompok Petani Pemakai Air (P3A/ Mitra Cai) oleh Proyek pengairan pedesaan, IPPHT oleh Proyek PHT, KPK oleh Proyek P4K, Kelompokkani PIR-BUN oleh Proyek Perkebunan Inti Rakyat.
- 4. Organisasi Petani Yang Ditumbuhkembangkan oleh LSM/ Swasta;** Misalnya Kelompokkani Karet yang ditumbuhkan oleh PT. Goodyear.

5. Organisasi Petani Yang Tumbuh Atas Inisiatif Petani Sendiri; misalnya Asosiasi Tebu Rakyat, Asosiasi Petani Kopi, Himpunan Peternak Kelinci, Asosiasi Peternak Ikan Hias dll.

Dewasa ini sebagian besar organisasi petani yang dicontohkan di atas masih tergantung kepada kelembagaan yang menumbuhkannya, baik dalam hal penguatan kapasitas organisasi, kegiatan maupun dalam hal keuangan. Kebanyakan organisasi tersebut ada, apabila masih terikat dengan para pembina atau instansi yang menumbuhkan. Begitu pembinaan lepas, organisasi tersebut menjadi bubar. Namun banyak pula organisasi petani yang tumbuh dan berkembang terus sesuai dengan harapan para anggotanya untuk mencapai kepentingan bersama di bidang ekonomi seperti Koperasi Susu, Asosiasi Petani Sapi Perah. Banyak juga yang tumbuh dan berkembang menjadi kelembagaan masyarakat seperti Subak di Propinsi Bali dan kelembagaan masyarakat lainnya di bidang pertanian. Hal yang demikian disebabkan tumbuh dan berkembangnya keyakinan para anggota bahwa organisasi itu adalah milik mereka sendiri

BAB III

CIRI-CIRI ORGANISASI PETANI

A. ORGANISASI PETANI NON FORMAL

1. Interaksi antar anggota bersifat kekeluargaan dan intensif sedangkan antar anggota biasanya saling mengenal;
2. Tujuan lebih bersifat sosial dari pada ekonomi;
3. Pembagian tugas, peranan dan tanggungjawab berdasarkan kesepakatan baik lisan maupun tertulis;
4. Belum mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang jelas;
5. Kepengurusan dipilih berdasarkan ketokohan, senioritas, disegani dan mempunyai kelebihan tertentu;
6. Kegiatan organisasi lebih diutamakan untuk mendukung usahatani keluarga melalui pembelajaran dan kerjasama kelompok;
7. Fungsi organisasi lebih mengarah kepada kelas belajar dan wahana kerjasama.

B. ORGANISASI PETANI FORMAL

1. Interaksi antar anggota lebih bersifat formal dan umumnya antar anggota kurang saling mengenal;
2. Tujuan lebih bersifat ekonomi dari pada sosial;

3. Pembagian tugas, peranan dan tanggungjawab berdasarkan kesepakatan yang dituangkan secara tertulis;
4. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang jelas dan berbadan hukum;
5. Kepengurusan dipilih secara demokratis sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
6. Kegiatan organisasi lebih bersifat komersial yang dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen;
7. Kegiatan organisasi lebih diutamakan untuk mengembangkan organisasi menjadi unit ekonomi.

C. ORGANISASI PETANI YANG TANGGUH

1. Organisasi Non Formal
 - a. Dibentuk dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan dan keswadayaan. Prinsip demokrasi memberikan landasan bahwa pendapat dan aspirasi anggota dihargai serta menjunjung hasil kesepakatan bersama. Keterbukaan memberikan landasan bahwa semua anggota mempunyai akses yang sama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pembentukan organisasi. Sedangkan prinsip keswadayaan memberikan landasan bahwa pembentukan organisasi dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota.

- b. Organisasi terstruktur dan mempunyai aturan-aturan yang jelas. Terstruktur artinya ada pembagian tugas yang jelas diantara para anggotanya dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Aturan yang jelas adalah ketentuan-ketentuan yang disusun, disepakati dan ditaati bersama.
- c. Kegiatan organisasi dilaksanakan atas dasar perencanaan yang disusun bersama dan hasilnya dirasakan bermanfaat bagi para anggota serta masyarakat sekitar.
- d. Kegiatan organisasi yang meliputi kelas belajar dan wahana kerjasama terus berlanjut bagi perkembangan usaha para anggota yang makin efisien dan menguntungkan.

2. Organisasi Formal

- a. Dibentuk dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan dan keswadayaan serta mengikuti ketentuan pembentukan suatu organisasi formal.
- b. Mempunyai susunan pengurus yang dipilih dari dan ditetapkan dalam rapat anggota untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- c. Mempunyai rencana kerja tertulis yang disepakati bersama dalam rapat anggota. Dilaksanakan oleh

sekelompok orang yang ditetapkan dan hasilnya dipertanggung jawabkan kepada semua anggota.

- d. Kegiatan organisasi yang meliputi kegiatan ekonomi mengarah kepada skala ekonomi dan efisiensi serta kegiatan sosial politik yang memperjuangkan dan melindungi hak serta kepentingan para anggotanya.
- e. Keberadaan organisasi diakui dan dapat dipertanggung jawabkan tidak hanya kepada petani tetapi pada khalayak masyarakat secara luas.



BAB IV

PRINSIP, LINGKUP DAN STRATEGI PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI

A. PRINSIP PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI

Pengembangan organisasi petani didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. **Kebebasan**, artinya menghargai kepada para individu para petani untuk berorganisasi sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan serta memilih organisasi yang mereka kehendaki sesuai dengan kepentingannya. Setiap individu bisa tanpa atau menjadi anggota satu atau lebih organisasi petani.
2. **Keterbukaan**, artinya semua anggota terlibat dan memiliki akses yang sama untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna tumbuhnya rasa saling percaya dan kepedulian yang besar dalam berorganisasi.
3. **Partisipatif**, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola (merencanakan, melaksanakan serta melakukan penilaian kinerja) organisasi.
4. **Keswadayaan** artinya mengembangkan kemampuan penggalian potensi diri sendiri para anggota dalam penyediaan dana dan sarana serta pendayagunaan sumberdaya guna terwujudnya kemandirian organisasi.

B. RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI

Lingkup Pengembangan Organisasi Petani meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia,** artinya para petani yang menjadi anggota organisasi petani, didorong dan dimotivasi agar berkembang menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas, produktif, kreatif, inovatif, disiplin dan mandiri. Dengan demikian, mereka dapat lebih meningkatkan peranannya dalam berusahatani dan peransertanya dalam bermasyarakat sehingga menjadi keluarga yang sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang makmur;
- 2. Peningkatan Manajemen Organisasi,** artinya oerorganisasi petani harus didorong dan diberdayakan sebagai organisasi yang transparan, bersih, bekerja secara efisien dan efektif sehingga mampu melayani kepentingan anggota serta kegiatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan baik kepada anggota maupun kepada masyarakat di sekitarnya.

Pengembangan dinamika organisasi diarahkan untuk menjadi organisasi pembelajaran, sosial poiitik dan ekonomi.

Organisasi Petani harus dipimpin oleh orang-orang yang berdedikasi tinggi, berwibawa, cakap serta tanpa pamrih. Selalu terjadi alih kepemimpinan secara kontinyu.

3. **Penumbuh kembangan keswadayaan ;** artinya organisasai petani harus menjadi organsisasi yang mandiri, mampu berkreasi untuk melakukan aktivitasnya sendiri serta pendanaan yang diperlukan secara sendiri. Modal usaha utama didapat dari pemupukan modal bersama dari seluruh anggotanya.

C. **STRATEGI PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI**

1. **Pengembangan kepemimpinan dan profesionalisme anggotanya;**

Penumbuhan organisasi petani tidak hanya menekankan pada keterampilan teknis dan managerial usaha tani, tetapi yang lebih penting adalah **kepemimpinan** dalam organisasi. Dalam hal penumbuhan organisasi petani atas kesadarannya sendiri memerlukan inisiator, baik dari penyuluh pertanian dan atau tokoh masyarakat setempat. Selanjutnya penumbuhan organisasi petani diawali dengan metode partisipatory rural appraisal (PRA) dengan melibatkan organisasi sasaran secara penuh (pendekatan dari bawah).

2. **Pengembangan Organisasi berdasarkan Tujuan dan Kepentingan Anggotanya;**

Pengembangan organisasi petani adalah pengembangan interaksi yang dinamis dan timbal balik antara anggota-anggota organisasi petani guna terciptanya kerjasama antar anggota yang dinamis untuk meningkatkan

produktivitas organisasi petani. Pengembangan organisasi petani didasarkan kepada tipologi organisasi petani yang ada, adanya tujuan dan kepentingan organisasi yang lebih besar serta adanya perubahan-perubahan di luar organisasi yang mengharuskan organisasi tersebut berubah dan berkembang.

3. Penumbuh-kembangkan Keswadayaan dan Keswadanaan

Para anggota diarahkan untuk penggalan potensi diri, tumbuh dan berkembangnya kreativitas baik secara individu maupun secara bersama serta penggalan kesatuan untuk tumbuh dan kokohnya kelembagaan dari mereka sendiri. Partisipasi dari semua anggota secara transparan dan demokratis akan menumbuh-kembangkan keswadayaan dan keswadanaan kelembagaan petani.

4. Pengembangan mekanisme jaringan pelayanan

Para anggota harus secara terus-menerus dikembangkan kemampuannya untuk dapat mengakses kepada informasi pasar sehingga produknya dapat dipasarkan sesuai dengan permintaan pasar serta memanfaatkan teknologi yang tepat guna sehingga usahanya semakin efisien dan mendapatkan keuntungan usaha yang jauh lebih besar lagi.

5. Pengembangan dinamika organisasi menjadi organisasi pembelajaran, sosial politik dan ekonomi

Organisasi Petani sebagai wadah belajar mengajar bagi para anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta sikapnya dalam berusahatani yang lebih baik

Organisasi Petani sebagai wahana kerjasama baik dalam menyampaikan kehendak dan aspirasi maupun menerima informasi dari luar secara bersama untuk perbaikan dan pengembangan usahanya.

Organisasi Petani sebagai kelembagaan kerjasama di bidang ekonomi harus mampu mencapai skala ekonomi yang rasional, mampu bernegosiasi dalam memasarkan hasil usaha para anggotanya serta memiliki posisi tawar yang kuat.

BAB V

LANGKAH-LANGKAH PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI

A. PENUMBUHAN ORGANISASI PETANI

Penumbuhan organisasi petani dilaksanakan melalui langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dan informasi, yang meliputi antara lain :
 - 1) Tingkat pemahaman tentang organisasi petani;
 - 2) Keadaan petani dan keluarganya;
 - 3) Keadaan usahatani yang ada;
 - 4) Keadaan sebaran, domisili dan jenis usahatani;
 - 5) Keadaan kelembagaan masyarakat yang ada.
2. Advokasi kepada para petani khususnya tokoh-tokoh petani setempat serta informasi dan penjelasan mengenai:
 - 1) Pengertian tentang organisasi petani, antara lain mengenai; Apa itu organisasi tani, tujuan berorganisasi serta manfaatnya berorganisasi untuk kepentingan usahatannya serta hidup bermasyarakat yang lebih baik lagi.
 - 2) Proses atau langkah-langkah dalam menumbuhkan/ membentuk organisasi petani.

- 3) Kewajiban dan hak setiap petani yang menjadi anggota organisasi serta para pengurus.
- 4) Penyusunan rencana kerja serta cara kerja organisasi petani.

Penumbuhan organisasi petani dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa, penyuluh pertanian sebagai mitra kerja petani dan instansi terkait. Selanjutnya kesepakatan membentuk organisasi petani dituangkan dalam berita acara pembentukan organisasi. Pemilihan pengurus organisasi petani dilakukan secara musyawarah-mufakat dari anggota oleh seluruh anggota organisasi.

Penumbuhan organisasi yang mantap memerlukan kesabaran sesuai dengan tingkat kesadaran para petani yang akan membentuk organisasi. Pembentukan organisasi yang terlalu cepat atau terlalu lama dapat mengakibatkan turunnya minat calon anggota organisasi, dan hal ini harus dihindarkan.

Sebagai tindak lanjut dari penumbuhan organisasi dan pemilihan pengurus maka diadakan pertemuan lanjutan yang dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan atau menetapkan rencana kerja organisasi.

Fungsi Organisasi Petani

1. Wadah kelas belajar mengajar

Organisasi petani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan dan

Sikap (PKS) dalam berusahatani yang lebih baik dan menguntungkan serta mandiri untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Agar proses belajar-mengajar tersebut dapat berlangsung dengan baik, organisasi petani diarahkan agar mempunyai kemampuan sebagai berikut :

- a. Menggali dan merumuskan keperluan belajar;
- b. Merencanakan dan mempersiapkan keperluan belajar;
- c. Berhubungan dan bekerjasama dengan sumber informasi yang diperlukan dalam proses belajar-mengajar, baik yang berasal dari sesama petani, instansi pembina maupun pihak-pihak lain;
- d. Menciptakan iklim/lingkungan belajar yang sesuai;
- e. Berperan aktif dalam proses belajar-mengajar, termasuk mendatangi BPP, BIPP-K/KIPPK; Badan; Sub Dinas; Seksi dan unit kerja lain yang menangani penyuluhan pertanian, BPTP, Perguruan Tinggi dan sumber informasi lainnya, dan mengundang penyuluh, peneliti maupun konsultan ke organisasi;
- f. Mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat maupun masalah yang dihadapi anggota organisasi;
- g. Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan organisasi;

- h. Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama;
- i. Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala di dalam organisasi petani, antar organisasi petani atau dengan instansi/ lembaga terkait.

2. Wahana Kerjasama

Organisasi petani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam organisasi dan antar organisasi serta dengan pihak lain untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan, serta menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Dalam hal ini organisasi petani perlu membangun hubungan kemitraan dengan pihak lain, diantaranya dengan Koperasi, Perusahaan Swasta maupun BUMN, yang berhubungan dengan peningkatan produksi, pemasaran serta pendapatan dan kesejahteraan anggota organisasi.

Untuk itu organisasi petani hendaknya memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut :

- a) Menciptakan suasana saling kenal, saling percaya-mempercayai dan selalu berkeinginan untuk bekerjasama;
- b) Menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan-pandangan diantara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama;
- c) Mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara sesama anggota sesuai dengan kesepakatan bersama;

- d) Mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab diantara sesama anggota organisasi;
- e) Merencanakan dan melaksanakan musyawarah, pertemuan, tukar pikiran, agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota organisasi;
- f) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam organisasi maupun dengan pihak lain;
- g) Bekerjasama atau melakukan hubungan kemitraan dengan pihak pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan permodalan;
- h) Mengadakan pemupukan modal untuk keperluan pengembangan usaha anggota organisasi;

3. Unit Produksi

Usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota organisasi petani, secara keseluruhan dipandang sebagai satu unit produksi, sehingga dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi yang berwawasan agribisnis. Sebagai satu unit produksi maka volume produksi, waktu serta kesinambungan hasil produksi dapat menjamin atas permintaan pasar. Dengan demikian, pengadaan sarana produksi, penerapan berbagai inovasi, pengolahan dan pemasaran hasil dapat dilaksanakan dengan biaya/ongkos yang lebih murah, serta harga produksi yang lebih tinggi, sehingga keuntungan usahatani yang diperoleh meningkat. Dengan kerjasama seperti tersebut di atas, usahatani anggota organisasi petani dapat terus dikembangkan

dan pengelolaan sebagai unit usaha juga dapat ditingkatkan, sehingga organisasi petani tersebut akan berkembang menjadi organisasi usaha atau kelompok usaha yang memenuhi skala ekonomi.

Untuk itu, organisasi petani diarahkan untuk memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut :

- a) Mengambil keputusan dalam menentukan pola usahatani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, pemasaran, sarana produksi dan sumberdaya alam;
- b) Menyusun rencana kegiatan bersama (Rencana Kegiatan Kelompok) atas dasar pertimbangan efisiensi dibanding dilakukan sendiri-sendiri;
- c) Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usahatani para anggotanya sesuai dengan Rencana Kegiatan Kelompok;
- d) Menumbuhkan pola kemitraan dengan pihak swasta dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usahatani dengan pendekatan agribisnis;
- e) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam organisasi, maupun kesepakatan dengan pihak lain;
- f) Menganalisa dan menilai pelaksanaan Rencana Kerja Kelompok (RKK) serta merumuskan perbaikan/

peningkatannya agar efektivitas dan efisiensi usahatani anggota makin lebih baik;

- g) Meningkatkan kesinambungan usaha dan kelestarian lingkungan;
- h) Mengelola administrasi kegiatan dan keuangan organisasi secara baik.

B. PENINGKATAN KEMAMPUAN ANGGOTA

Upaya upaya peningkatan kemampuan para petani sebagai anggota organisasi petani antara lain meliputi :

- a) Menciptakan iklim yang kondusif agar para petani mampu untuk membentuk dan menumbuh kembangkan organisasinya secara partisipatif (dari, oleh dan untuk petani).
- b) Menumbuh kembangkan kreativitas dan prakarsa anggota organisasi petani untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi dan akses permodalan.
- c) Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi baik dalam usahataniya maupun dalam organisasinya.
- d) Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi pasar dan peluang usaha untuk mengembangkan komoditas yang lebih menguntungkan;

- e) Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi wilayah, untuk mengembangkan komoditi yang dikembangkan/ diusahakan sesuai dengan tersedianya pasar yang memberikan keuntungan usaha;
- f) Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha masing masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin pada permintaan pasar dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas;
- g) Meningkatkan kemampuan untuk dapat mengelola usahatani secara komersial, berkelanjutan dan akrab lingkungan;
- h) Mengembangkan kegiatan profesi yang bersifat ilmiah dalam peningkatan kemampuan berorganisasi dan berusaha.
- i) Mendorong dan mengadvokasi agar para petani mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.

C. PENGUATAN ORGANISASI PETANI

Organisasi petani dengan berbagai fungsi tersebut di atas, selanjutnya diusahakan agar menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan oleh para anggotanya. Organisasi petani sebagai kelas belajar harus mampu menorganisir proses belajar mengajar yang terencana, berkesinambungan dan efektif. Organisasi

petani sebagai wahana kerjasama harus mampu melakukan efisiensi dalam berbagai kegiatannya, sehingga memberikan nilai tambah kepada para anggotanya dan organisasi petani sebagai unit ekonomi harus mampu mencari dan memanfaatkan berbagai peluang dan kesempatan berusaha serta peningkatan usaha kearah komersial.

Untuk itu organisasi petani dikembangkan melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- a) Adanya pertemuan / rapat anggota /rapat pengurus yang dilakukan secara berkala dan bersinambungan;
- b) Disusunnya rencana kerja secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap kahir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipatif;
- c) Memiliki pencatatan / pengadministrasian organisasi yang rapi;
- d) Memperkuat usaha kegiatan bersama di sektor hulu dan hilir;
- e) Mengelola usaha secara komersial dan berorientasi ke pasar;
- f) Organisasi petani harus berfungsi sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota organisasi pada khususnya
- g) Mengadakan kegiatan pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan organisasi

Disamping peningkatan/ pengembangan organisasi petani di bidang ekonomi, peningkatan fungsi organisasi petani juga mencakup aspek aspek sebagai berikut :

- a) Sosial budaya (pengembangan potensi lokal);
- b) Sosial politik (memperjuangkan hak-hak petani untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, kesejahteraan dan politik);

D. PERANAN PEMERINTAH

Dalam penumbuhan dan pengembangan organisasi petani, pemerintah pada dasarnya berperan untuk:

- a) Menciptakan iklim untuk berkembangnya prakarsa dan inisiatif petani
- b) Memberikan kemudahan
 - 1. Memberikan bantuan
 - 2. Memberikan perlindungan
 - 3. Memberikan Pelayanan Informasi

Pusat

- 1) Penyusunan kebijaksanaan penyuluhan pertanian
- 2) Merumuskan standarisasi dan akreditasi pengembangan organisasi petani
- 3) Merumuskan peraturan perundangan yang berpihak kepada kepentingan petani dan pelaku agribisnis lainnya.

- 4) Menyelenggarakan pengkajian untuk pengembangan organisasi petani
- 5) Mengembangkan pangkalan data organisasi petani.
- 6) Memberikan pelayanan informasi dan dukungan pengembangan jaringan informasi nasional dalam organisasi petani

Provinsi

- 1) Memberikan pelayanan informasi dan dukungan pengembangan jaringan informasi di tingkat Kabupaten/ Kota.
- 2) Memfasilitasi kerjasama organisasi petani lintas kabupaten/ kota.
- 3) Menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan petani dalam meningkatkan kompetensi organisasi petani.
- 4) Menyelenggarakan pengkajian pengembangan organisasi petani
- 5) Membantu organisasi petani-nelayan mengumpulkan, mengolah, merakit, memproduksi dan menyebarkan informasi pertanian sesuai dengan kebutuhan petani dan pengembangan wilayah.
- 6) Memfasilitasi adanya forum atau wadah yang menampung hubungan kesinambungan antar organisasi petani
- 7) Memberikan umpan balik ke Pemerintah Pusat dalam kaitannya dengan pengembangan organisasi petani.

Kabupaten/Kota

- 1) Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang pengembangan organisasi petani
- 2) Menfasilitasi kerjasama antar organisasi petani
- 3) Mendorong swadaya masyarakat dalam pengembangan organisasi petani
- 4) Memberikan dukungan pelayanan informasi melalui kelembagaan informasi pertanian dan pengembangan jaringan informasi data base kelembagaan petani.
- 5) Mendorong tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial ekonomi petani.
- 6) Memberikan umpan balik ke Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Kecamatan

- 1) Mengikut sertakan organisasi petani antara lain organisasi tani dalam menyusun program penyuluhan pertanian untuk mendukung pembangunan sistem dan usaha agribisnis sesuai dengan kebutuhannya atau masalah yang dihadapinya.
- 2) Menfasilitasi berbagai kegiatan petani dan pelaku agribisnis lainnya, misalnya seminar, pertemuan teknis, temu lapang (field day), musyawarah, rembug.
- 3) Menfasilitasi pengembangan organisasi petani dan pelaku agribisnis lainnya, misalnya : paguyuban, jaringan petani dan pelaku agribisnis lainnya.
- 4) Menfasilitasi pengembangan kepemimpinan petani dan pelaku agribisnis lainnya.

- 5) Memfasilitasi pengembangan media yang dibuat oleh petani dan pelaku agribisnis lainnya sebagai sarana untuk menyebarkan informasi diantara mereka.
- 6) Melakukan kerjasama kelembagaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan organisasi petani.
- 7) Bersama peneliti memfasilitasi riset aksi yang dilakukan oleh petani dan pelaku agribisnis lainnya.
- 8) Mengakses informasi dan teknologi yang diperlukan untuk kegiatan organisasi petani.
- 9) Memberikan umpan balik tentang pelaksanaan pembinaan organisasi petani di kecamatan ke Kabupaten/Kota.

E. PERANAN MASYARAKAT

Dalam organisasi petani, peranan masyarakat dapat diwujudkan melalui kerjasama dan mendorong terlaksananya fungsi organisasi petani serta sekaligus mengawasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan-perundangan yang berlaku (sosial kontrol). Dalam melaksanakan program atau proyek disuatu wilayah/daerah, tidak perlu membentuk organisasi petani yang baru, tetapi cukup menggunakan organisasi petani yang telah ada, misalnya kelompok tani dan sebagainya.

Dalam penumbuhan dan pengembangan organisasi petani, masyarakat berperan untuk:

1. Memberi kesempatan atau mengikut sertakan organisasi petani untuk berperan serta dalam pembangunan masyarakat

2. Memberikan saran-saran bagi berkembangnya organisasi petani
3. Ikut serta dalam kegiatan organisasi sebagai anggota yang baik
4. Memberi saran kepada pemerintah untuk menggunakan organisasi petani yang ada daripada membentuk organisasi yang baru yang memiliki tujuan yang sama.

F. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring

Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistimatis untuk dapat melihat / menilai apakah suatu proses kegiatan telah dilaksanakan atau berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila tidak faktor apa yang menyebabkan dan tindakan apa yang harus dilakukan agar proses kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuannya. Apabila sudah sesuai, apakah memerlukan penyempurnaan lagi agar kegiatan tersebut lebih efisien dan efektif. Keberhasilan suatu proses kegiatan dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan masa berikutnya yang akan lebih baik lagi.

Monitoring peumbuhan dan pengembangan organisasi petani merupakan kegiatan pengamatan dan pengukuran performansi proses kegiatan penumbuhan dan pengembangan organisasi petani baik itu organisasi nonformal maupun organisasi formal. Monitoring dilakukan baik oleh kelembagaan yang memberi fasilitasi

(Pemerintah atau Swasta) maupun oleh masyarakat petani itu sendiri sebagai bagian dari organisasi tersebut yang pelaksanaannya dilakukan secara partisipatif dengan para anggota organisasi petani yang bersangkutan.

Alat ukur monitoring disusun atas dasar kriteria penilaian/ pengamatan yang didasarkan dari penjabaran langkah langkah operasioanl penum,buhan dan pengembangan kelembagaan petani. Monitoring diharapkan selalu memberikan bukti-bukti tentang ada tidaknya penyimpangan pelaksanaan rencana kegiatan. Disamping itu juga diharapkan ada tidaknya informasi yang menentukan dampak kegiatan dalam rangka memperlancar kegiatan evaluasi selama proses penumbuhan dan pengembangan organisasi petani berlangsung ("on-going evaluation").

Monitoring ini di tingkat pemerintahan kabupaten/kota dilakukan oleh Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten / Kota (BIPP-K/KIPPK; Badan; Sub Dinas; Seksi dan unit kerja lain yang menangani penyuluhan pertanian) dengan mengikutsertakan organisasi-organisasi non pemerintah di Kabupaten/Kota secara partisipatif dengan petani anggota organisasi yang bersangkutan.

Di tingkat pemerintahan Provinsi monitoring dilakukan oleh Balai Diklat Pertanian/Agribisnis atau unit kerja lain yang mengelola penyuluhan pertanian dan mengikutsertakan organisasi-organisasi non pemerintah misalnya Kelompok KTNA Provinsi. Sedang di tingkat Pusat, monitoring dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM Pertanian, cq Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian dan mengikutsertakan organisasi-organisasi non pemerintah misalnya Kelompok KTNA Nasional dan organisasi non Pemerintah lainnya.

Kegiatan monitoring penumbuhan dan pengembangan organisasi petani meliputi bidang-bidang administrasi, fisik dan fungsional atau sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis penumbuhan dan pengembangan organisasi petani. Pedoman yang dipakai acuan adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah. Secara khusus kegiatan monitoring mencakup materi sebagai berikut:

- a. Aspek perencanaan penumbuhan dan pengembangan organisasi petani;
- b. Keadaan dan ketersediaan fasilitas-fasilitas kerja penyuluhan pertanian yang dapat digunakan dalam kegiatan penumbuhan dan pengembangan organisasi petani;
- c. Penilaian proses pelaksanaan kerja atau pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan organisasi petani yang dilaksanakan;
- d. Kinerja petugas dalam pembimbingan dan pengembangan organisasi petani;
- e. Peningkatan Sumber Daya Manusia Petani
- f. Pengembangan aspek statika (organisasi, administrasi) dan aspek dinamika (kegiatan dan kepengurusan) serta aspek kepemimpinan (kaderisasi anggota organisasi).

Evaluasi

Evaluasi merupakan upaya penilaian atas hasil sesuatu kegiatan melalui pengumpulan dan penganalisaan informasi / data secara sistematis serta mengikuti prosedur tertentu yang secara

ilmu diakui keabsahannya. Evaluasi bisa dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun pada hasil serta dampak/out come suatu kegiatan.

Evaluasi penumbuhan dan pengembangan organisasi petani dalam pedoman ini dimaksudkan untuk menilai atau mengukur tingkat kemajuan organisasi baik itu organisasi petani non formal maupun formal dilihat dari kemandiriannya. Kriteria penilaian dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani hendaknya dirumuskan dari ciri ciri organisasi mandiri baik untuk organisasi non formal maupun organisasi petani formal seperti tercantum dalam bab III buku ini.

Evaluator berasal dari pengelola kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi petani ataupun dari unit kerja yang berkepentingan atas keberhasilan maupun dampak kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi petani yang diharapkan. Sebaiknya evaluasi dilakukan secara partisipatif dengan para petani sebagai anggota organisasi petani yang bersangkutan.

Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan organisasi petani dari waktu ke waktu. Oleh karena itu penyuluh pertanian di lapangan dan petugas lainnya diharapkan membuat catatan-catatan yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan perencanaan tahun berikutnya.

Para penyuluh pertanian dalam menyiapkan data dan informasi pembinaan dan pengembangan organisasi petani memerlukan catatan-catatan antara lain :

- 1) Nama dan alamat, data dan lain lain dari organisasi petani binaannya;
- 2) Penumbuhan, peningkatan kemampuan organisasi petani;
- 3) Permasalahan yang dihadapi antara lain: Sosial-ekonomi, Dana, Pengorganisasian, Metode pembinaan, dan lain-lain;
- 4) Kegiatan penumbuhan dan pengembangan organisasi petani yang dilaksanakan serta hasilnya;
- 5) Lain-lain sesuai program spesifik lokalita.

Balai Penyuluhan Pertanian / Kecamatan perlu menyusun catatan rekapitulasi dan perkembangan organisasi petani di wilayahnya, antara lain menyangkut :

- 1) Jumlah organisasi petani (formal dan non-formal);
- 2) Jumlah anggota organisasi petani (pria-wanita dewasa muda);
- 3) Jumlah organisasi petani yang telah melakukan mitra usaha (Koperasi, Swasta, BUMN dan lain-lain);
- 4) Jumlah anggota organisasi petani yang menjadi pengurus, Badan Pemeriksa, BPP Koperasi, Swasta, BUMN) dan lain-lain;
- 5) Lain-lain yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan organisasi petani.

Pelaporan terdiri dari data dan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan kegiatan penumbuihan dan pengembangan organisasi petani mencakup input, pelaksanaan kegiatan dan out put yang dihasilkan.

Pelaporan dilaksanakan secara berkala oleh :

- 1) Penyuluh Pertanian di lapangan menyampaikan laporan kepada Kepala/Koordinator penyuluh pertanian BPP atas dasar inventarisasi/pencatatan kegiatan di lapangan;
- 2) Kepala/Koordinator penyuluh pertanian BPP menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Kerja/pengelola penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota atas dasar laporan penyuluh pertanian dan tembusannya disampaikan ke instansi terkait;
- 3) Kepala Badan/Kantor/Balai/Kepala Unit Kerja/pengelola penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan atas dasar laporan dari Kepala/Koordinator penyuluh pertanian BPP dan tembusannya disampaikan ke Balai Diklat Pertanian/Agribisnis Provinsi dan instansi terkait lainnya di Provinsi.
- 4) Kepala Balai Diklat Pertanian/Agribisnis menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian cq. Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Departemen Pertanian dan tembusannya ke instansi terkait di tingkat pusat.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman umum ini hanya memuat hal-hal yang bersifat umum dan garis besar, sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan pelaksanaannya secara teknis dan lebih rinci, ditindak lanjuti dengan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

